

NOTA KESEPAHAMAN

antara

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

dengan

MENTERI PERHUBUNGAN
Berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Nomor : 4 TAHUN 2019

Nomor : PJ 75 TAHUN 2019

Sepakat mengadakan kerja sama di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang meliputi:

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Sosialisasi dan penyebarluasan kegiatan melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, atau lokakarya;
3. Konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara pejabat setingkat eselon I atau eselon II di lingkungan kerja PARA PIHAK.

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta, pada tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (15 – 02 – 2019).

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,
KEPALA**



RONI DWI SUSANTO

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
MENTERI**



BUDI KARYA SUMADI